



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. HARYITNO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 621684

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 505.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m<sup>2</sup>/271 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m<sup>2</sup>/20 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m<sup>2</sup>/20 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m<sup>2</sup>/22 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 273.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MOB PENUMPANG Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOTOR, HONDA SOLO/SCOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. MOTOR, HONDA SOLO/VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000



7. MOBIL, DAIHATSU MICRO/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.215.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	782.915.000
III. HUTANG	Rp.	16.545.130
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	766.369.870

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.